

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sektor pertanian merupakan pengembangan sumber daya alam (SDA). Sektor pertanian tersebut dapat meliputi penyediaan komoditi tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Didalam sub sektor perkebunan meliputi kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, dan teh. Minyak sawit diprediksi sebagai salah satu komoditas non migas perkebunan yang memiliki potensi yang cerah di masa mendatang. Potensi tersebut dilihat dari keragaman kegunaan dari minyak kelapa sawit. Seperti halnya, minyak sawit dapat digunakan sebagai bahan mentah industri pagan, dapat pula digunakan sebagai bahan mentah industri non-pangan.¹ Peranan kelapa sawit didalam perindustrian juga terlihat penting sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun untuk bahan bakar. Dan jika komoditas minyak sawit dapat menguasai pasar global maka akan mampu meningkatkan devisa negara tersebut.

Pada kenyataanya adanya industri perkebunan kelapa sawit dapat memberikan dampak positif pada sumber daya manusia dimana dengan adanya produksi perkebunan kelapa sawit, maka mampu pula untuk menciptakan kesempatan kerja serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya pengembangan kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang paling banyak diminati oleh para usaha perkebunan, di seluruh penjuru dunia. Hal ini dibuktikan dengan adanya tren pembukaan lahan yang ditunjukkan sebagai perkebunan kelapa sawit.² Tentunya setiap negara ingin memiliki potensi untuk menciptakan komoditas minyak sawit dengan melihat banyak keuntungan dari komoditas tersebut. Namun, minyak sawit mentah atau CPO menjadi komoditas yang eksklusif karena hanya dihasilkan pada negara-negara di wilayah tertentu, yaitu

¹ Suyatno Risza, *Kelapa Sawit "Upaya Peningkatan Produktivitas"*, (Yogyakarta: penerbit kanisius, 1994), hlm. 22

² <http://kelapasawit.ptnasa.net>, dalam "Manfaat kelapa sawit bagi kehidupan manusia", pada 28 April 2017, (diakses pada 09 November 2017)

tropis dan sebagian sub-tropis dengan beberapa faktor yang kemungkinan dapat menjadikan minyak sawit dapat tumbuh secara maksimal.

Hal tersebut dapat dilihat melalui jenis tanah, kelapa sawit dapat tumbuh baik pada berbagai ordo tanah gambut (Histosols).³ Tanah Gambut merupakan tipe tanah yang cocok untuk pekerbunan sawit.⁴ Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki tanah gambut yang cukup luas, sehingga adanya potensi perkebunan sawit. Selain itu, Indonesia juga termasuk dalam negara beriklim tropis yang dapat mendukung perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya potensi tersebut Indonesia ingin memanfaatkannya untuk menyediakan lahan minyak sawit serta mencoba untuk mengembangkan komoditas perkebunan kelapa sawit tersebut. Oleh sebab itu, usaha dari sektor pertanian menjadi menjanjikan, terutama untuk dijalankan di negara dengan kekayaan alam yang melimpah seperti Indonesia.

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1848 dan baru dibudidayakan secara komersial dalam bentuk perkebunan pada waktu 1911.⁵ Pada tahun 1848, Pemerintah kolonial Belanda mendatangkan empat batang bibit kelapa sawit yang ditanam di Kebun Raya Bogor, kemudian hasil anaknya pohon sawit dipindahkan ke Deli, Sumatera Utara. Apabila dilihat dari sisi geografi di beberapa provinsi di Indonesia yang terdapat perkebunan minyak kelapa sawit yang luas seperti halnya daerah, Riau adalah produsen minyak sawit terbesar di Indonesia, disusul oleh Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.⁶ Berdasarkan geografi (provinsi) penghasil minyak utama yang dikunjungi

³ <http://peternakan.litbang.pertanian.go.id>, “Kesesuaian Lahan Untuk Kelapa Sawit Di Indonesia”, (diakses pada 08 November 2017 20:57)

⁴ <https://gapki.id>, dalam “Gambut di kebun sawit tak mudah terbakar”, (diakses pada 08 November 2017 21:14)

⁵ Tim penulis PS, *kelapa sawit “usaha budidaya, pemanfaatan hasil dan aspek pemasaran”*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1992), hlm. 1-2

⁶ <https://www.indonesia-investments.com>, dalam “Minyak Kelapa Sawit” pada 26 Juni 2017, (diakses pada 05 November 2017 15:07)

oleh FAS meliputi Sumatera dan Kalimantan⁷, dapat dibuktikan melalui gambar peta berikut:

Gambar 1.1
Rute perjalanan perkebunan minyak sawit



Sumber: United States Department of Agriculture

Dengan berkembangnya industri minyak sawit dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perusahaan berbasis minyak sawit yang ada di Indonesia serta luas wilayah sawit diseluruh provinsinya dan jumlah tenaga kerja di komoditas perkebunan secara umum. Jika dilihat dari tahun 2012 hingga 2015 jumlah perusahaan sawit terus meningkat, yakni dari jumlah 1.510 di tahun 2012 kemudian meningkat di tahun 2015 sebanyak 1.600 dengan hasil sementara. Selain itu, terjadi pula peningkatan pada luas area lahan pada komoditas minyak sawit dari tahun 2012 hingga 2015. Pada tahun 2012 telah mencapai 10.133.32 Ha, kemudian berhasil meningkat pada 2015 dengan hasil sementara berhasil mencapai 11.260.30 Ha. Disamping itu, jumlah tenaga kerja di komoditas perkebunan pada tahun

⁷ <https://ipad.fas.usda.gov>, dalam “Indonesia: Palm Oil Production Prospects Continue to Grow”, (diakses 30 Maret 2018 pukul 22:44)

2013 sebanyak 655.998 orang.⁸ Oleh sebab itu, sawit dan produk turunan lainnya layak disebut sebagai komoditas yang berpotensi untuk menunjang perdagangan baik domestik maupun internasional.

Keberadaan komoditas minyak sawit tentunya menjadi momentum penting bagi perekonomian Indonesia, dan tidak disangka bahwa komoditas minyak sawit ini mampu menyumbang sebagian besar devisa negara. Oleh sebab itu, diharapkan adanya upaya dalam memaksimalkan baik produksi maupun ekspor minyak sawit, agar dapat menjadi salah satu komoditas andalan bagi Indonesia. Hingga, pada akhirnya harapan tersebut menjadi kenyataan, bahwa minyak sawit telah berhasil menjadi salah satu komoditas andalan di Indonesia menurut Kementerian Perdagangan Indonesia. Sejak tahun 2012, minyak sawit termasuk kedalam 10 komoditas utama dan potensial⁹. Komoditas minyak sawit berada pada urutan ke 4, diatas komoditas produk hasil hutan dan dibawah dari komoditas karet dan produk karet. Hal tersebut membuktikan bahwa minyak sawit sejak tahun 2012 mampu menjadi komoditas andalan.

Seiring berkembangnya waktu, minyak sawit terus berkembang dan dapat memainkan perannya di pasar internasional. Disamping itu, Indonesia mempunyai keunggulan yang menjadi potensi untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit maupun industri minyak sawit dari segi geografis dan SDM. Dari sisi daya saing bahan baku, Indonesia mempunyai ketersediaan bahan baku yang tinggi mengingat lahan perkebunan kelapa sawit nasional terbilang luas di dunia. Hal ini diperkuat oleh data yang dikeluarkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia karena adanya produksi minyak sawit di Indonesia menunjukkan tren

⁸ <https://www.bps.go.id>, dalam “Statistik dasar dan Statistik Sektoral”, (diakses pada 10 November 2017)

⁹ <http://www.kemendag.go.id>, dalam “10 Komoditi Utama dan Potensial”, (diakses pada 19 Februari 2018, pukul 15:18)

peningkatan dari tahun ke tahun.¹⁰ Oleh sebab itu, Indonesia disebut sebagai produsen minyak kelapa sawit nomor satu di dunia. Sejak pada tahun 2012 menurut riset Rabobank beberapa waktu lalu menyebutkan, Indonesia mendominasi komoditas minyak sawit dan telah berhasil memproduksi minyak sawit Indonesia sendiri, mengkontribusikan 48 persen.¹¹

Selain itu, dalam Top 10 Palm Oil Producers by Country 2016, dimana Indonesia telah berperan aktif sebagai pemasok pertama dengan jumlah produksi sebanyak 34,520 ton (58 persen).¹² Dari sumber tersebut dapat dinyatakan bahwa komoditas minyak sawit Indonesia sangat berperan penting pada pasar internasional. Keberhasilan minyak sawit sebagai komoditas andalan tersebut tidak terlepas dari adanya prospek peningkatan dari segi jumlah produksi. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil jumlah produksi CPO (*crude palm oil*) yang terus meningkat setiap tahunnya. Terutama pada tahun 2012 hingga 2017 teruslah meningkat 2 (dua) kali lipat dari setiap tahunnya. Prospek pada tahun 2012 telah berhasil memproduksi minyak sawit mentah atau *crude palm oil* sebanyak 26.015.518, hingga di 2016 produksi CPO terus meningkat sebanyak 33.229.381, Dan pada tahun 2017 dengan perolehan sementara berhasil meningkatkan jumlah produksinya yang mencapai angka 35.359.384.¹³

Selain itu, dibalik keberhasilan minyak sawit sebagai komoditas andalan Indonesia diikuti karena adanya peningkatan baik dari segi ekspor pula, yang merupakan upaya atau dorongan yang telah lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Jika kembali pada masa awal perkembangan ekspor minyak sawit dahulu, Indonesia mengalami banyak peningkatan. Indonesia memulai ekspor pertama kali pada tahun 1919

¹⁰ <http://www.tribunnews.com>, dalam “Perusahaan Besar yang Punya Kebun Kelapa Sawit Luas Ternyata Tak Berkantor di Indonesia”, (diakses pada 30 Maret 2018, pukul 10:13)

¹¹ <http://www.bumn.go.id>, dalam “Persaingan Indonesia–Malaysia jadi raja sawit dunia” pada 17 Oktober 2017 (diakses pada 06 November 2017)

¹² <http://www.palmoilanalytics.com>, dalam “Essential Palm Oil Statistics 2017” (diakses pada 06 November 2017 23:47)

¹³ <http://ditjenbun.pertanian.go.id>, dalam “Statistik Perkebunan Sawit 2015-2017”, (diakses pada 09 November 2017 2:50)

dengan volume sebanyak 181 ton. Nilai ekspor dari tahun ke tahun berikutnya lebih cenderung meningkat hingga pada tahun 1938 berhasil mencapai 211 ribu ton atau setara dengan 44% dari seluruh jumlah ekspor di dunia. Hingga, saat ini Indonesia masih dapat mempertahankan keberadaan komoditas tersebut. Berdasarkan data dari Oil World, trend penggunaan komoditi berbasis minyak kelapa sawit di pasar global terus meningkat dari waktu ke waktu mengalahkan industri berbasis komoditas vegetable oil lainnya seperti minyak gandum, minyak jagung, minyak kelapa.¹⁴

Sejak tahun 2012, puncak pencapaian ekspor minyak sawit Indonesia telah mengalami baik peningkatan maupun penurunan, yang mana pada akhirnya ditahun 2016 Indonesia berhasil menjadi negara yang utama sebagai pengekspor tertinggi dalam nilai dolar. Pada tahun 2012 telah mencapai \$19.56, kemudian cenderung menurun di tahun 2013 dengan nilai \$18.43, namun di tahun 2014 minyak sawit menjadi stabil dan bahkan meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya yaitu senilai \$ 21.7, namun di tahun 2015 ekspor minyak sawit mengalami kembali penurunan sebanyak \$ 17.6, dan hingga pada tahun 2016 ekspor minyak sawit stabil dengan nilai yang sama dari sebelumnya tahun sebelumnya \$ 17.73.¹⁵ Indonesia berhasil mencapai nilai dolar tertinggi dalam kegiatan ekspor minyak sawit, disusul dengan Malaysia dan Netherlands.

Selain itu, menurut kalkulasi Makro Indikator Pertanian Indonesia Total GDP atau *gross domestic product* terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, hal tersebut didorong karena adanya kegiatan ekspor komoditas yang diproduksi di Indonesia, salah satunya adalah minyak sawit. Total GDP dari tahun 2012 hingga 2016 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 sebanyak \$ 878.20, tahun 2013 \$ 868.3, tahun 2014 \$ 870.27, tahun 2015 \$ 895.68, dan tahun 2016 sebanyak \$ 936.955. Selain itu, khusus ekspor komoditas

¹⁴ <http://kemenperin.go.id>, dalam “Prospek dan Permasalahan Industri Sawit”, (diakses pada 08 November 2017)

¹⁵ <http://www.kemendag.go.id>, dalam “Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan”, (diakses pada 22 Februari 2018 pukul 09:55)

minyak sawit dimana nilai pasar yang terus berubah setiap tahunnya, karena telah mengalami situasi naik turun. Hal tersebut dapat kita lihat dari tahun 2012 ke tahun 2016 *Palm Oil in Export Revenues (USD billions)*. Dalam jangka panjang, permintaan dunia akan minyak sawit menunjukkan kecenderungan meningkat sejalan dengan jumlah populasi dunia yang bertumbuh dan karenanya meningkatkan konsumsi produk-produk dengan bahan baku minyak sawit.

Terlebih Jika Indonesia dapat memaksimalkan kegiatan ekspor serta meningkatkan kualitas produksinya tak menutup kemungkinan bahwa Indonesia dapat bertahan serta menguatkan posisinya sebagai produsen dan eksportir minyak kelapa sawit di pasar internasional. Hal tersebut pula akan menimbulkan daya saing baik produksi maupun ekspor dengan negara lain yang memiliki potensi sumber daya alam seperti minyak sawit. Dengan mengatasi hal itu Indonesia telah memiliki target penjualan ekspor kebeberapa negara lebih banyak lagi, selama ini Indonesia telah menjalin perdagangan internasional di beberapa negara bagian Eropa, Asia dan Timur Tengah (Tiongkok, India, Singapura, Jerman, Mesir dll). Dengan adanya kegiatan ekspor tersebut, tentunya dilatarbelakangi beberapa tindakan strategi bahkan rancangan visi-misi dari pemerintah Indonesia yakni Kementerian Perdagangan RI.

Dimana diharapkan upaya pemerintah dapat memaksimalkan hasil produksi komoditas minyak sawit dipasar global tersebut. Terlebih lagi bahwa komoditas minyak sawit telah menjadi salah satu komoditas andalan bagi Indonesia, tentunya momentum ini semestinya dapat dimaksimalkan oleh pemerintah. Seperti halnya, terus menggenjot produksi minyak sawit serta menjalin lebih banyak lagi kebeberapa negara dengan kegiatan ekspor. Seperti yang tertuang dalam salah satu tujuan. Kemendag yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2015–2019 yaitu: Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa.¹⁶

¹⁶ <http://www.kemendag.go.id>, dalam “Rencana Strategis”, (diakses pada 09 November 2019 3:25)

Dengan tujuan utama peningkatan ekspor non-migas termasuk minyak sawit Indonesia, diharapkan kedepannya kementerian perdagangan dapat mengoperasionalkan visi-misi tersebut terhadap lingkup pasar internasional di komoditas minyak sawit.

Oleh sebab itu, adanya peningkatan komoditas minyak sawit peran kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian serta Organisasi GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) baik dari jumlah produksi minyak sawit, perluasan area lahan minyak sawit, peningkatan tenaga kerja diperkebunan sawit serta nilai julai ekspor dapat dimanfaatkan sebagai pendongkrak perekonomian Indonesia, dan menjadikan komoditas tersebut memiliki potensi yang terus mendominasi dan menguasai pasar internasional. Diharapkan melalui visi misi serta tujuannya dapat terealisasikan peningkatan mitra dagang ekspor dengan negara lain serta dapat meminimalisir hambatan di dalam proses dagang. Komoditas kelapa sawit diyakini masih menjadi penopang ekspor nasional hingga lima tahun ke depan. Menteri Perdagangan mengatakan 70% komoditas kelapa sawit Indonesia masih akan masuk ke pasar global hingga lima tahun ke depan.

Hal itu membuat pemerintah menjadikan sektor itu sebagai penopang ekspor nasional. Menilai minyak sawit merupakan komoditas yang cukup berpengaruh dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, produk ekspor terus diupayakan sawit harus menjadi prioritas dalam pasar ekspor Indonesia¹⁷ Diharapkan dapat konsistensi ekspor nonmigas perlu dijaga. Hal ini merupakan salah satu poin penting dalam strategi promosi dan pengembangan ekspor nasional 2015-2020. Gapki menyatakan Indonesia bisa memproduksi paling tidak 40 juta ton kelapa sawit per tahun mulai dari tahun 2020. Untuk mewujudkan Visi 2020 tersebut, maka perlu dilakukan antara lain, revitalisasi perkebunan, yakni percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan. Prospek pemerintah saat ini telah menyediakan lahan perkebunan seluas

¹⁷ <http://industri.bisnis.com>, dalam "5 Tahun ke Depan Sawit Masih Topang Ekspor Nasional", pada 1 September 2017, (diakses pada 09 November 2017 10:42)

13,723 juta hektare yang terletak di kawasan Indonesia Timur seperti Provinsi Maluku, Papua, dan Irian Jaya.¹⁸

Adapun upaya memperluas (pembukaan) perkebunan dan produksi kelapa sawit, yang dikarenakan adanya peningkatan permintaan khususnya di pasar internasional. Namun, sayangnya upaya perluasan lahan tersebut mendapatkan kritikan dari beberapa kalangan termasuk LSM. Sehingga, kelapa sawit Indonesia dalam proses produksi dan ekspornya telah menghadapi hambatan dan tantangan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) nasional dan internasional pro-lingkungan maupun organisasi lingkungan barat yang mengembangkan *black campaign* (kampanye negatif) isu lingkungan. Sehingga target serta visi-misi tujuan tersebut harus terhalang yang akan menjadikan tantangan atau bahkan hambatan bagi peran minyak sawit di pasar Internasional. Hambatan tersebut dikarenakan adanya isu atau kampanye-kampanye negatif yang mengatakan bahwa produksi minyak kelapa sawit telah merusak lingkungan, pembakaran hutan untuk perluasan area lahan sawit, serta sawit yang tidak sehat.

Seperti yang diungkapkan menurut UCS (*Union of Concerned Scientists*) mengungkapkan bahwa salah satu sumber emisi pemanasan global yang sangat terkait dengan minyak kelapa sawit adalah pengeringan dan pembakaran rawa kaya karbon yang dikenal sebagai lahan gambut.¹⁹ Selain itu, Greenpeace menginvestigasi tiga perkebunan di Kalimantan Barat dan Tengah dimana tercatat kebakaran besar selama krisis kabut asap di tahun 2015. Dalam setiap kasus, telah terjadi deforestasi yang meluas dan pengeringan lahan gambut sebelum terjadi kebakaran. Deforestasi dan pengeringan lahan gambut secara luas diakui sebagai akar penyebab krisis kebakaran, termasuk oleh pemerintah Indonesia.²⁰ Dengan mereka melihat akibat adanya eksploitasi kebun sawit yang berdampak pada lingkungan sekitar. Isu itu terus berlanjut

¹⁸ <http://www.kemenperin.go.id>, dalam "Indonesia Produsen Kelapa Sawit Terbesar" (diakses pada 05 November 2017)

¹⁹ <http://www.ucsusa.org>, dalam "Palm Oil", (diakses pada 13 November 2017)

²⁰ <http://www.greenpeace.org>, dalam "Greenpeace: Perusahaan minyak sawit raksasa memicu kebakaran hutan di Kalimantan", (diakses pada 13 November 2017)

hingga timbulnya dari kampanye negatif menjadi *black campaign* di Eropa.

Negative Campaign itu dinilai berpotensi mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar dan berdampak pada perekonomian nasional Indonesia. Jika dikaitkan dengan kampanye negatif yang dilontarkan negara barat melalui LSM disebabkan minyak nabati mereka kalah bersaing dengan minyak sawit, sehingga terus-menerus menyerang produk hasil perkebunan Indonesia.²¹ Seperti halnya adanya tanggapan keras dari UCS, pendukung kami, organisasi sekutu kami, dan masyarakat, mengupayakan semakin banyak perusahaan konsumen Amerika telah mengadopsi komitmen untuk membeli kelapa sawit bebas gundul dan bebas gambut. Dimana perusahaan-perusahaan barat mencegah import minyak sawit yang diakibatkan dari deforestasi, sehingga lebih tepatnya mereka menerapkan bebas deforestasi. Dengan berkembangnya *Negative Campaign*, Eropa sebagai pelopor adanya tudingan tersebut (dikarenakan adanya minyak sawit berstandar di Eropa) yang tentunya menjadi hambatan untuk memasuki pasar Eropa.

Terlebih Eropa termasuk salah satu negara importir CPO dari Indonesia. Namun, kampanye tersebut terus berlanjut hingga kemudian Parlemen Uni Eropa telah mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit pada April 2017 lalu. Resolusi tersebut dikeluarkan, karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).²² Pada 20 Maret 2017 Uni Eropa, yang mana dilansir bahwa adanya laporan mengenai resolusi mengenai *on palm oil and deforestation of rainforests* yang mana Indonesia juga termasuk didalam masalah kerusakan lingkungan. Hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi hambatan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia kedepannya. Pemerintah merupakan aspek

²¹ <http://industri.bisnis.com>, dalam "Sawit Nasional Akan Terus Diserang LSM Asing dan Lokal", pada 26 April 2016, (diakses pada 10 November 2017 10:40)

²² <http://ekonomi.kompas.com>, dalam "Mendag Ancam Negara-negara yang Kampanyekan Negatif CPO Indonesia", pada 03 November 2017, (diakses pada 10 November 2017 10:10)

yang sangat penting dalam menentukan kualitas daya saing produk Indonesia.

Selain itu, pemerintah memiliki wewenang dalam menciptakan regulasi, menfalisasi, mengatur serta melindungi, apapun industri komoditas Indonesia termasuk minyak sawit. Maka perlunya peran Pemerintah Indonesia seperti (kementerian perdagangan serta kementerian pertanian). Untuk menciptakan beberapa strategis, sehingga dapat meniadakan bahkan menghapuskan kampanye-kampanye negatif tersebut dan resolusi deforestasi tersebut demi mempertahankan ekspor minyak sawit Indonesia di pasar dunia kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Strategi Pemerintah Indonesia menjaga stabilitas ekspor minyak sawit berkelanjutan setelah kampanye negatif (tahun 2014-2017)?

C. Kerangka Dasar Teori

Untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis perlu mendiskripsikan jawaban dengan menggunakan teori ataupun konsep sebagai kerangka dasar berfikir. Dalam hal ini, penulis memilih konsep strategi dan konsep kepentingan nasional.

1. Konsep Strategi

Secara umum definisi dari konsep strategis merupakan suatu cara atau *action plans* untuk mencapai suatu tujuan demi tercapainya sebuah kepentingan. Menurut Chistance, strategi adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan apa yang dilaksanakan oleh organisasi.²³ Selain itu, menurut pandangan para ahli yang lain yaitu John Lovel, strategi

²³ Christie C. Ronald dalam R A Sauriono, *Strategi Perumusan* (Yogyakarta, 1986) hal. 9

adalah serangkaian langkah-langkah (moves) atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam suatu kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan.²⁴ Selain itu, Lovel menyarankan beberapa faktor utama yang mempengaruhi proses perumusan strategi suatu negara-bangsa, yaitu: struktur sistem internasional, persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan. Seperti halnya strategi dalam suatu lingkup bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah di terapkan oleh negara (pemerintah), maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dan menurut para ahli lainnya mengenai konsep strategi adalah menurut Pearce II dan Robinson, strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan. Dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pengertian dari strategi secara umum adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Asumsi dasar perspektif strategi-strategi menurut para ahli tersebut bahwa negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, berdasarkan kalkulasi rasional di kancah internasional. Selain itu pentingnya strategi bagi kelangsungan hidup dari suatu aktor baik negara, maupun kelompok untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien, dimana setiap aktor harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau

²⁴ Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional tingkat analisis dan teoritis*, (Yogyakarta: pusat antar universitas-studi sosial, Universitas Gadjah Mada, 1989) hal. 90

hambatan yang datang dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) di dalam proses menuju tujuan yang telah disepakati. Konsep strategi juga dapat digambarkan dimana untuk mencapai suatu tujuan tersebut di perlukan adanya strategi yang disusun atau direncanakan, agar dapat mengetahui bagaimana cara untuk mencapainya.

Sama halnya seperti strategi yang tentunya erat kaitannya dengan Upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas minyak sawit setelah adanya kampanye negatif ataupun tuduhan yang dilontarkan di beberapa kalangan baik kelompok atau organisasi (LSM), serta adanya resolusi Uni Eropa terhadap minyak sawit Indonesia yang tertera dalam “Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests”. Seperti yang telah disinggung diatas bahwa dalam pencapaian kepentingan ataupun tujuan Indonesia sebagai produsen maupun eksportir utama minyak sawit tentunya ada hambatan dalam pencapaian tujuan. Sehingga dibutuhkannya strategi (cara) dari beberapa pihak yang relevan dengan kasus tersebut seperti Pemerintah Indonesia yakni Kementerian Republik Indonesia. Diperlukannya peran pemerintah, yang nantinya diharapkan dapat mempertahankan persawitan Indonesia serta mengahapus isu (deforestasi) ataupun kampanye negatif terhadap persawitan Indonesia.

Kampanye negatif tersebut yang nantinya dikhawatirkan dapat menghambat perekonomian Indonesia, yang mana minyak sawit dikenal sebagai salah satu komoditas perkebunan yang berperan dalam meningkatkan perekonomian dan penyumbang devisa negara. Tentunya membutuhkan beberapa cara atau strategi untuk dapat mengatasi kampanye tersebut dan kemudian terus dapat meningkatkan ekspor CPO (*crude palm oil*) dipasar internasional serta dapat bertahan dalam mendominasi komoditas minyak sawit di pasar internasional. Maka pentingnya sebuah tindakan ataupun upaya pemerintah negara dalam menangani isu-isu

tersebut yang harus secepatnya diselesaikan, jika tidak industri sektor perkebunan minyak sawit dicurigai akan stagnan atau bahkan merosot turun. Dalam sejarah perkembangannya, komoditi kelapa sawit tidak terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global.

Perubahan strategis nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan perkebunan harus mengikuti prinsip lingkungan perkebunan yang berkelanjutan. Sehingga pembangunan perkebunan berkelanjutan harus mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perkebunan serta mampu menjawab tantangan-tantangan globalisasi. Isu atau kampanye negatif tentang lingkungan yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit menyebabkan paradigma atau efek buruk pada masyarakat maupun lingkungan sekitar. Paradigma buruk perkebunan sawit juga disebabkan oleh adanya kampanye yang menyatakan bahwa kelapa sawit adalah tanaman yang tidak ramah lingkungan. Isu-isu tersebut disinyalir berasal dari negara barat yang ingin menurunkan peredaran kelapa sawit di negara Uni-Eropa.

Negara Barat cenderung tidak ingin kelapa sawit nasional lebih berkembang dibandingkan dengan minyak nabatinya. Oleh sebabnya, banyak kampanye hitam bahkan muncul berita resolusi deforestasi Uni Eropa mengenai kelapa sawit nasional. Maka, tidak lama tentunya hal semacam ini dinilai berpotensi mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar dan berdampak pada perekonomian nasional. Pemerintah lebih memilih menanggapi serangan miring terhadap minyak sawit dengan semakin memperbaiki kualitas. Selain itu, tidak ada rencana untuk membalas dengan mempersulit produk impor dari Eropa.²⁵Sejauh ini penanganan terhadap kampanye tersebut tentunya melibatkan banyak aktor yang berkaitan seperti

²⁵ <https://finance.detik.co>, dalam "Mendag: Kampanye Hitam Sawit RI di Eropa Vulgar", pada 23 Agustus 2017, (diakses pada 11 November 2017 2:42)

Kementerian Pertanian. Tentunya dengan ini Kementan tidak hanya diam dimana Kementan yang berkaitan erat dengan pembentukan standar minyak sawit dipasar global. Strategi sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan industri minyak sawit mentah, bahwa dimana Indonesia dituntut untuk membentuk standar minyak sawit global yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti halnya RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*).

Sebelumnya Indonesia telah menetapkan RSPO sebagai standar minyak sawitnya di pasar global. Namun, seiring waktu Indonesia memantapkan diri untuk menciptakan standar minyak sawit yang dikelolanya sendiri. Standar tersebut dibentuk pada tahun 2009 dan kemudian diperkenalkan pada tahun 2011, yang disebut sebagai ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*). Kini Indonesia telah memiliki standar minyak sawitnya sendiri. Namun, dengan adanya kampanye-kampanye negatif yang dilontarkan terhadap persawitan Indonesia tentunya memberikan pukul tersendiri terhadap Indonesia, sehingga pemerintah terutama Kementerian Pertanian menciptakan strategi pada standar minyak sawit yang dapat menyatakan bahwa minyak sawit Indonesia didalam produksi tidak sama sekali mengandung unsur deforestasi (penggundulan hutan).

Dengan adanya prinsip strategi tersebut diharapkan nantinya percepatan perkembangan komoditas minyak sawit akan semakin baik kedepannya. Seperti halnya strategi penguatan (revitalisasi) ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) sebagai standar dipasar global atau regulasi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Dikarenakan agar setiap negara yang memproduksi minyak sawit memiliki standar minyak sawit. ISPO merupakan salah satu instrumen untuk mendukung usaha berkelanjutan mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekspor dunia. ISPO pertama dibentuk

pada tahun 2009 dan dipublikasi pada tahun 2011, ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19/Permentan/OT/140/3/2011 tentang pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Yang kemudian, diperbaharui menjadi Permentan No. 11/Permentan/ OT/140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.²⁶

Permentan No 11/2015 tentang ISPO merupakan regulasi yang wajib diterapkan oleh kepada perusahaan kelapa sawit dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, dan penegakan paraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa sawitan.²⁷ Inisiatif ISPO bertujuan untuk mendukung produksi berkelanjutan dan penggunaan minyak kelapa sawit dan meminimalkan dampak lingkungan dan sosial. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani kecil untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan, dan akan mempromosikan Sustainable Palm Oil Sistem Indonesia (ISPO) di masyarakat internasional.²⁸ Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Indonesia yang kini sudah memiliki Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO yaitu suatu peraturan pemerintah yang wajib diberlakukan kepada industri dan petani sawit agar memproduksi minyak sawit Indonesia yang berkelanjutan melalui penerapan sertifikasi. Menurut Wamendag, melalui implementasi ISPO,

²⁶ Didik Mochamad Rofiqi, :” *Strategi Percepatan Pengembangan Industri Turunan Minyak Sawit Mentah (Msm) Di Indonesia*”, (Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2016), 54

²⁷ <http://ditjenbun.pertanian.go.id>, dalam “ISPO Mewujudkan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan”, (diakses pada 11 November 2017 3:00)

²⁸ <http://www.ispo-org.or.id>, dalam “inisiatif ISPO, (diakses pada 14 November 2017)

Pemerintah Indonesia menunjukkan dukungan akan pentingnya produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Indonesia juga telah melaksanakan kewajiban skema sertifikasi berkelanjutan dengan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan bersifat wajib. Sertifikasi tersebut menjamin semua pelaku usaha sawit di Indonesia, baik skala besar maupun kecil, memenuhi standar keberlanjutan yang tinggi. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan, salah satu upaya melawan kampanye negatif tersebut adalah dengan terus memperbaiki kredibilitas sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).²⁹

2. Teori Diplomasi

Diplomasi secara praktiknya merupakan politik luar negeri antara dua atau lebih negara dengan kegiatan negoisasi yang dilakukan demi mencapai tujuan nasional negara tersebut baik dari segi ekonomi, politik, budaya dan pendidikan. Pada umumnya diplomasi diwujudkan untuk dapat mempertahankan stabilitas negaranya baik perekonomian maupun pertahanan keamanan. Seperti yang dikutip dari *The oxford English Dictionary* memberi konotasi sebagai berikut: “manajemen hubungan internasional melalui negoisasi, yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil, bisnis atau seni para diplomat”. Menurut beberapa para ahli diantaranya yaitu, KM Panikkar menjelaskan mengenai “diplomasi yang dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.”³⁰

Selain itu, menurut para ahli lainnya yakni R.P Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara

²⁹ <http://sains.kompas.com>, dalam “Mendag Tak Ingin Kampanye Negatif Sawit Indonesia Terus Berlanjut”, pada 3 Oktober 2017, (diakses pada 11 November 2017)

³⁰ S.L. Roy, *Diplomasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 2-3

dengan aktor-aktor hubungan internasional. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobbying*, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.³¹ Dapat disimpulkan, jika dikaitkan dengan teori menurut beberapa ahli tersebut diplomasi merupakan proses kegiatan negoisasi diantar negara, negoisasi tersebut dijalankan dengan beberapa cara diantaranya *lobbying* maupun kunjungan antar negara bahkan promosi yang menyangkut perekonomian negara tersebut.

Diplomasi pada umumnya merupakan manajemen hubungan antar negara. Dapat disimpulkan bahwa secara umum diplomasi telah mewakili tekanan politik, ekonomi, dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antar para pelaku negoisasi.³² Sehingga, diplomasi dapat disimpulkan sebagai hubungan antar negara baik bilateral maupun multilateral yang dilakukan dengan cara negoisasi (*lobbying*, promosi) guna mencapai kepentingan nasionalnya. Biasanya diplomasi dilakukan oleh para diplomat suatu negara dengan tujuan untuk bertukar informasi maupun pikiran, dengan maksud mencapai kepentingannya. Diplomasi yang dimaksud disini adalah diplomasi ekonomi. Bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia melakukan diplomasi (*lobbying*) dengan negara lain yang mana bermaksud untuk mencapai kepentingan perekonomian nasionalnya.

Seperti yang sebelumnya dikatakan, bahwa diplomasi dilakukan untuk mempertahankan, menjaga

³¹ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 4

³² Sukawarsini Djelantik, *op.cit.*, hlm. 4

perekonomian negaranya serta mempromosikan suatu potensi (ekonomi) yang dimiliki oleh suatu negara. Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa, akan merealisasikan ideologi Trisakti yaitu menjadikan Indonesia negara yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai perekonomian tersebut maka diperlukan suatu terobosan dalam hal diplomasi ekonomi Indonesia dengan mitranya baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Diplomasi ekonomi juga dapat diartikan sebagai upaya pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan di bidang ekonomi, yang mencakup perdagangan komoditas, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan dan kerja sama teknik yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, mendukung pembangunan nasional dan memajukan kepentingan Indonesia di kancah global.³³

Cara kerja yang dilakukan dalam lingkup diplomasi ekonomipun terdiri dari beberapa bagian. Seperti halnya, membuat analisis, menyusun catatan, membangun jaringan keluar, membangun kerjasama, serta mengirimkan utusan dagang.³⁴ Diharapkan melalui kegiatan diplomasi tersebut nantinya akan menumbuhkan kesejahteraan tidak saja bagi negara pengirim tetapi juga bagi negara penerima. Diplomasi ekonomi inipun menjadi momentum penting untuk menopang perekonomian negara. Dimana ekonomi telah banyak memainkan perannya dalam membangun kesuksesan sebuah negara. Semua aspek tugas ekonomi suatu negara dilaksanakan dibawah aktivitas promosi negara (perdagangan). Sama halnya seperti upaya upaya pemerintah Indonesia yakni Kementerian Perdagangan

³³ <http://berkas.dpr.go.id>, dalam “Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo”, (diakses pada 26 April 2018, pukul 15:59)

³⁴ Sukawarsini Djelantik, *op.cit.*, hlm. 233-235

RI serta Kementerian Luar Negeri RI dimana kedua aktor tersebut saling berhubungan untuk menjalankan diplomasi ekonomi.

Serta halnya dalam tujuan visi misinya yaitu meningkatkan ^{ekspor} non-migas salah satunya pada komoditas minyak sawit. Dimana Kemenlu sebagai fungsinya untuk dapat menjalin hubungan luar negeri, dan Kemendag fungsinya dengan mengadakan kerjasama perdagangan baik impor maupun ekspor. Tujuan dijalakannya diplomasi tersebut untuk mampu mendorong perekonomian nasional. Keberadaan minyak sawit sebagai salah satu komoditas andalan Kemendag, dapat dijadikan pacuan sebagai target ekspor Indonesia kedepannya sehingga dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya yaitu menopang perekonomian nasional. Namun, adanya isu atau kampanye negatif ditengah makmurnya minyak sawit Indonesia menjadi masalah utama bagi komoditas tersebut yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Berkembangnya isu kerusakan lingkungan (sebagai kampanye negatif) tersebut sangat dikhawatirkan dapat menjadi ancaman dan kendala dalam produksi dan minat ekspor minyak sawit. Oleh sebab itu, pentingnya keberadaan Kemendag dan Kemenlu dalam mempertahankan minyak sawit, sebagai minyak sawit berkelanjutan agar dapat mempertahankan stabilitas minyak sawit yang mana Indonesia sebagai pemasok tersebut minyak sawit di pasar dunia.

Kemendag telah melakukan beberapa langkah strategis salah satunya melalui diplomasi sawit. Dengan menjalin kerjasama baik ^{bersifat} promosi maupun seminar dengan negara lain maupun mitra dagang eksportir. Indonesia perlu memperkuat diplomasi dan komunikasi sektor kelapa sawit di tingkat global. Diplomasi sawit merupakan promosi komoditas minyak sawit diberbagai negara melalui negoisasi. Kemendag sejauh ini telah menjalankan diplomasi minyak sawit di beberapa negara, seperti Prancis dan Russia. Salah satu diplomasi sawit

yang telah dilaksanakan oleh Kemendag dikutip dari dokumen kemendag Dalam kunjungannya ke Eropa baru-baru ini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) membuat gebrakan untuk meningkatkan ekspor nonmigas. Strategi diplomasi minyak sawit sebagai bagian dari upaya pengembangan ekspor perlu diperkuat karena saat ini permasalahan dan tantangan yang dihadapi sektor sawit nasional sangat kompleks.

Indonesia terus memperkuat komitmen untuk mewujudkan sektor sawit Indonesia yang berkelanjutan. Untuk memperkuat diplomasi sawit di dunia, Arlinda melakukan promosi sawit saat kunjungan kerja ke Prancis selama 27 Februari-1 Maret 2017. Arlinda mengunjungi kantor Aliansi Prancis (the French Alliance for Sustainable Palm Oil). Maksud dan tujuan dari diplomasi sawit tersebut adanya upaya-upaya Indonesia dalam menciptakan sektor sawit Indonesia yang berkelanjutan. Promosi terhadap sawit Indonesia yang berkelanjutan akan terus gencar dilakukan di negara mitra dagang. Kolaborasi dengan stakeholders lokal di Prancis perlu dibina untuk menggalang dukungan terhadap sawit Indonesia.³⁵ Selain itu, Kemendag gencar melakukan beberapa promosi melalui seminar. Kemendag juga menggaris bawahi pentingnya kolaborasi yang kuat guna mendukung industri kelapa sawit.

Kemendag akan fokus memacu ekspor ke negara-negara pasar baru dan negara-negara berkembang di mana Indonesia memiliki posisi tawar yang relatif tinggi, seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika bagian selatan. Adapun, peningkatan ekspor sawit Indonesia akan digenjut antara lain dengan upaya counter trade, promosi terpadu, dan pemanfaatan keberadaan kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, serta

³⁵ <http://www.kemendag.go.id>, dalam “Perkuat Citra Sawit di Eropa, Indonesia Dukung Kemitraan Riset Sawit” (diakses pada 06 Desember 2017 14:26)

pendirian pusat informasi sawit di beberapa negara.³⁶ Diharapkan langkah strategi maupun cara baik dari pemerintah, dapat terealisasi, sehingga minyak sawit atau CPO dapat menjaga eksistensi produksi minyak sawitnya bahkan mempertahankan kedudukannya sebagai produsen minyak sawit terbesar dan juga meningkatkan ekspor di pasar global. Perwakilan Perdagangan Indonesia di luar negeri dituntut berperan secara proaktif, komunikatif, inovatif, dan promotif dalam menarasikan sawit Indonesia kepada seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya. Sehingga, tekanan perlambatan ekonomi global tidak menyurutkan Kementerian Perdagangan untuk melakukan diplomasi dan promosi produk kelapa sawit berkelanjutan dan turunannya di semua negara.

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menyimpulkan strategi pemerintah Indonesia menjaga stabilitas ekspor minyak sawit berkelanjutan ditengah isu deforestasi, sebagai berikut :

1. Revitalisasi penerapan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagai regulasi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Permentan No 11/2015 tentang sistem sertifikasi (ISPO) yang wajib diterapkan oleh kepada perusahaan kelapa sawit Indonesia.
2. Diplomasi minyak sawit oleh Kemendag, dengan mengadakan seminar dan promosi diberbagai negara.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Disini penulis menggunakan “Bagaimana” sebagai rumusan masalah, yang mana akan menjelaskan konsep

³⁶ <https://ekbis.sindonews.com>, dalam “Mendag dan Pelaku Sawit Siapkan Strategi Hadapi Hambatan Ekspor” (diakses pada 11 November 2017 3:44)

maupun teori yang terkait isu tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.³⁷

2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah menggunakan pengumpulan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan mengutip dari sumber lain seperti buku-buku perpustakaan, internet, jurnal, website resmi dan, sebagai referensi yang digunakan untuk mendukung penelitian ini.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab perumusan masalah mengenai strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekspor minyak sawit berkelanjutan setelah adanya kampanye negatif tahun 2014-2017
2. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai kampanye negatif dan Isu Deforestasi terhadap komoditas minyak sawit

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian sangat penting di tentukan agar penulis dapat menentukan batas-batas penelitian dan tidak menyimpang jauh dari bahasan utama dari penelitian. Jangkauan penelitian pada penulisan ini menggunakan rentan waktu dari tahun 2014 hingga 2017. Dipilih tahun 2014, karena adanya dampak (penurunan ekspor) akibat adanya isu deforestasi

³⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 23-24

terhadap minyak sawit Indonesia pada tahun ini semakin marak dan semakin berkembang. Dan pada tahun 2017, Parlemen Uni Eropa dengan adanya *report* resolusi minyak sawit. Yang berisikan bahayanya perluasan lahan sawit yang berakibat pada kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan produksi yang tidak sehat. Sehingga adanya peran pemerintah pada tahun 2015 hingga 2017, untuk dapat menjaga stabilitas ekspor minyak sawit Indonesia. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa penulis akan menyentuh data atau fakta yang berada diluar jangkauan penelitian jika dirasa relevan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan ini yang terbagi dalam 5 (lima) bab, dengan berbagai sub bab topik pembahasan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERKEMBANGAN DAN KONDISI MINYAK SAWIT MENTAH (CPO) DI INDONESIA

1. Perkembangan minyak sawit di Indonesia
 - a. Periode jajahan Jepang
 - b. Periode penjajahan Jepang
 - c. Periode pengalihan sampai saat ini
2. Pengembangan ekspor minyak sawit
 - a. Kerjasama ekspor minyak sawit Indonesia
 - b. Perkembangan produksi minyak sawit di Indonesia
 - c. Perkembangan ekspor minyak sawit Indonesia

BAB III SEJARAH DAN BERKEMBANGNYA ISU KAMPANYE NEGATIF DAN MUNCULNYA RESOLUSI MINYAK SAWIT UNI EROPA

- A. Sejarah Berkembangnya Isu Deforestasi (kampanye negatif) Di Indonesia
- B. Munculnya resolusi minyak sawit Uni Eropa

- C. Dampak kampanye negatif terhadap minyak sawit di Indonesia

BAB IV STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA STABILITAS EKSPOR MINYAK SAWIT

- A. Visi – misi Kementerian Pertanian RI dan Upaya (strategi) Pemerintah Indonesia
- B. Visi – misi Kementerian Perdagangan RI dan dan Upaya (strategi) Pemerintah Indonesia

BAB V KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan dari hasil pengkajian permasalahan tersebut mengenai upaya (strategi) yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani kampanye negatif terhadap minyak sawit guna menjaga stabilitas ekspor minyak sawit.